

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah. Anak yang belum matang secara matang dan fisik, maka kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar dan kondusif supaya anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diharapkan untuk menjadi penerus bangsa. Anak sangat rentan menjadi alasan dilakukan dan bahkan melakukan kekerasan terhadap orang-orang disekitarnya. Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari berbagai hubungan timbal balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Ditinjau dari perspetif hukum bahwa kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang di namakan tindak pidana.

Berdasarkan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ternyata memperlihatkan perilaku anak yang menjurus kepada tindak pidana kejahatan, seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian anat pelajar dan lain-lain sehingga anak berhadapan dengan proses hukum yang samaa dengan orang dewasa. Perilaku anak tersebut tidak cukup hanya dipandang sebagai

kenakalan biasa, tidak jarang perbuatan mereka tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia.

Persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan mani. Persetubuhan terhadap wanita belum cukup umur disyaratkan dilakukan “di luar perkawinan” artinya pelaku dan korban tidak terikat dalam suatu perkawinan. Apabila perbuatan pidana tersebut berlangsung secara terus-menerus atau berlanjut maka termasuk dalam klasifikasi sebagai satu perbuatan berlanjut. Saat ini tindak pidana persetubuhan atau perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam perkembangan sosial dewasa ini, terjadi kejahatan perkosaan terutama di kalangan masyarakat

ekonomi lemah. Berdasarkan data yang penulis temukan, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018, Polres Nganjuk menangani kasus tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur pada tahun 2015 sebanyak 8 kasus, pada tahun 2016 13 Kasus, Tahun 2017 18 Kasus, Tahun 2018 21 Kasus. Sehingga ditotalkan dalam jangka kurun waktu 5 Tahun ini kasus Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur meningkat dengan total keseluruhan mencapai 78 berita kasus yang ditangani oleh Polres Nganjuk. Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain. Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 285) yang menyatakan: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam belas tahun”.

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya

penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”<sup>1</sup>.

Perkosaan adalah dosa dan kejahatan besar bagi pelakunya, apalagi jika secara hukum terbukti, maka si pemerkosa dapat dijatuhi hukuman mati. Namun demikian, perempuan yang diperkosa tidak dianggap berdosa, sebab dia tidak berdaya dan tidak dapat dipersalahkan. Terhadap penanganan kasus perkosaan, terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian (misalnya berat ringannya hukuman dan rehabilitasi korban perkosaan) , sebab kasus pemerkosaan tidak hanya sekedar menjadi permasalahan kriminalitas semata, akan tetapi meliputi pula aspek sosiologis dan aspek psikologis (terutama bagi korban). Dapat dilihat, bahwa terdapat kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 1-2

Upaya perekayasa hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era Pembangunan Jangka Panjang II antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum (Pidana) nasional. Sekalipun naskah rancangan KUH Pidana Nasional (di bawah judul: Tindak pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan di muka Umum, Bab XVI Pasal 467) sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan kriminologi dan viktimologi. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terPidana.

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan Pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum Pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh

lembaga-lembaga sosial yang ada. Hubungan antara orang tua dengan anak merupakan suatu hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental sepiritualnya, mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak nakal diusahakan agar anak jangan dipisahkan dari orang tuanya. Mengingat pada Pasal 67 bahwa berlakunya undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka Pasal 45, 46 dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku, jadi perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Uraian latar belakang di atas, merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Sosiologis dan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak” (Studi Kasus Polres Nganjuk)**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana perkosaan sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus yang menyimpannya. Korban tindak pidana perkosaan bisa menjadi korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang melatar belakanginya terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak di Polres Nganjuk ?
2. Kendala apa yang hadapi Polres Nganjuk terkait penerapan Diversi dalam penyelesaian Tindak Pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan di dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak
2. Untuk mengetahui penerapan Diversi terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Untuk menemukan berbagai permasalahan hukum mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada Pengadilan Negeri Nganjuk.

2. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan khususnya mahasiswa program studi Ilmu Hukum.

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi masyarakat terkait dengan pentingnya mengetahui faktor-faktor yang melatar belakanginya anak dibawah

umur yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, baik faktor internal maupun faktor eksternal . Sehingga masyarakat umum tidak salah dalam menafsirkan hukum yang ada.

#### 4. Bagi Penegak Hukum

Sebagai referensi dan diharapkan penelitian ini berguna untuk gambaran bagi pihak yang berkepentingan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pemerkosaan. Agar proses hukum dapat berjalan lancar dan tidak mengakibatkan batal demi hukum.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik dari segi teoritis maupun segi praktis, sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang maupun oleh masyarakat luas mengenai masalah “Tinjauan Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak “

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum terutama bagi HAKIM, JAKSA, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban pemerosaan.



## **F. Metode Penelitian**

Agar dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, menurut Suharsimi Arikunto deskriptif analitis adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta ciri khas tertentu dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain peneliti dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>2</sup> Penelitian ini menggambarkan permasalahan tentang “Tinjauan Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak “

### **2. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Socio Legal Research*), Penelitian Tentang (Studi Kasus di Polres Nganjuk) jadi dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan *sosial empiris atau sosioal legal research*. Menurut Mardzuki penelitian *sosial legal reseacrh* hanya menempatkan hukum sebagai gejala

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Rineka Citra. Jakarta. hal. 21

sosial. Oleh karenanya dalam penelitian ini selalu dikaitkan masalah dengan yang terjadi di dalam proses pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Penelitian ini memerlukan beberapa jenis bahan hokum dari literature maupun sumber yang berbeda yaitu:

**a. Data primer**

Data Primer menurut Hilman Hadi kusuma adalah “data dasar”, “data asli” yang memperoleh penelitian dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Mencari informasi tambahan dengan melakukan penelitian ke lembaga langsung dari masyarakat dalam hal ini melalui penelitian di Polres Kota Nganjuk, Polres Kota Nganjuk, Jl. Gatot Subroto No. 116, Ringinanom, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur 64414

**b. Data sekunder**

Data sekunder di peroleh melalui peraturan perundang undangan atau hukum positif yang berlaku :

1. Pasal 1 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
2. Pasal 81 ayat (1) untuk perkosaan dan Pasal psal 81 ayat (2) untuk persetubuhan UU No.2 thun 2002 tentang Perlindungan anak.
3. Pasal 59 UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan bagaimana mengadili anak pelaku tindak pidana pemerkosaan

**c. Data Tersier**

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan bersumber pada peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.

- a. Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara pada instansi, serta pengumpulan bahan-bahan yang berkaitan dengan cara menginventarisasi Hukum Positif dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan materi penelitian baik bahan hukum primer maupun sebagai bahan hukum sekunder.

- b. **Analisis Data**

Analisis data dilakukan *sosio legal reseacrh*, karena bertitik tolak dari kehidupan sosial masyarakat serta peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Dalam hal ini memetakan kebutuhan bahan dan diklasifikasikan lebih lanjut untuk ditelaah mengenai “Tinjauan Sosiologis Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerkosaan” (Studi Kasus Polres Nganjuk). Dimana dalam penerapan Proses hukuman yang harus sesuai dengan asas hukum yang berlaku.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini, penulis akan menyajikan empat bab yang terdiri dari sub-sub bab, sistematika penulisannya secara singkat adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat hal-hal yang melatarbelakangi pemilihan topik dari penulisan skripsi dan sekaligus menjadi pengantar umum dalam memahami penulisan secara keseluruhan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Dalam Bab II ini penulis akan menguraikan landasan teori atau kajian teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang dipaparkan oleh penulis.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan setelah itu dikaji dan dianalisa secara sistematis dengan menggunakan teori-teori hukum yang digunakan dalam Bab Tinjauan Pustaka dengan mengaitkannya pada data atau dokumen yang telah diperoleh pada saat penelitian.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini merupakan bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisikan suatu kesimpulan dan saran terkait dengan

permasalahan yang telah diteliti oleh penulis serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran.

